

**PERAN PEMERINTAH DESA KEDUNGWANGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh

DENI PRASETYO

NIM. 183008

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN**

AGUSTUS 2022

**PERAN PEMERINTAH DESA KEDUNGWANGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Deni Prasetyo. Dosen : Dr. Winardi, S. H., M. Hum STKIP PGRI
Jombang; Jalan. Pattimura III/22 Telp. (0321) 861319
deniprasetya0207@gmail.com, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang, winardi@gmail.com,
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Jombang.

Abstrak

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa oleh karena itu peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan masyarakat di desa dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi dan pembangunan masyarakat desa. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa. (2) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa di bidang pembangunan infrastruktur desa. (3) Untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian masyarakat desa dan, (4) Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian masyarakat desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil yang diperoleh adalah (1) Peran pemerintah desa Kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat dibidang pembangunan didasari oleh UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 78 tentang pembangunan desa. Hasil pembangunan infrastruktur desa antara lain balai desa, jalan desa, lumbung pangan, bak tangka air, polkesdes, TPS/TPA dan pos kamling. (2) Faktor pendukung peran pemerintah desa Kedungwangi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan adalah rasa ingin maju, perkembangan teknologi dan zaman, pembangunan, potensi desa dari segi wilayah dan masyarakat, sementara untuk faktor penghambatnya adalah pada pendanaan, SDM, keadaan ekonomi masyarakat desa. (3) Peran pemerintah desa dalam bidang perekonomian dalam sektor perdagangan adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan, sementara untuk sektor pertanian mendatangkan mesin untuk membantu pekerjaan petani disawah. (4) Faktor pendukung peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalah rasa yang ingin maju dari masyarakat, perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih. Untuk faktor penghambatnya disektor perdagangan adalah kurang stabilnya harga barang, sementara disektor pertanian adalah dari pendidikan dan warga masyarakat yang lebih nyaman

dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, minimnya pemahaman tentang sistem dan alat saat ini.

Kata kunci : Kesejahteraan, Pemerintah desa, dan Kesejahteraan masyarakat.

Abstract

In improving the welfare of the village community, it must be made aware and considered by the village government, therefore the role of the village government is needed to monitor the condition of the community in the village and facilitate the development of economic resources and the development of village communities. The present study aimed (1) to describe the role of the village government in realizing community welfare in the field of village infrastructure development.(2) To describe the supporting factors and obstacles to the role of village governments in the field of village infrastructure development. (3) To describe the role of the village government in realizing community welfare in the economic field of the village community and, (4) To describe the supporting and inhibiting factors of the role of the village government in realizing community welfare in the economic field of the village community. This research used qualitative research. This research method used data collection using interviews and documentation. Data analysis is carried out by triangulation of sources. The results obtained are (1) The role of the Kedungwangi village government in the welfare of the community in the field of development is based on Law Number 6 of 2014 article 78 concerning village development. The results of village infrastructure development include village halls, village roads, food barns, water reservoirs, polkesdes, TPS /TPA and kamling posts. (2) Supporting factors for the role of the Kedungwangi village government in realizing community welfare in the field of development are the sense of wanting to advance, technological development and the times, development, village potential in terms of region and community, while the inhibiting factors are in funding, human resources, the economic condition of the village community. (3) The role of the village government in the economic sector in the trade sector is to conduct counseling and guidance, while for the agricultural sector, it brings in machinery to help the work of farmers in the field. (4) Supporting factors for the role of village governments in realizing community welfare in the economic field are the feeling of wanting to advance from society, technological developments and increasingly sophisticated times. For the inhibiting factor in the trade sector is the instability of the price of goods, while the agricultural sector is from education and citizens who are more comfortable with the agricultural system in ancient times, the lack of understanding of the current systems and tools.

Keywords: Welfare, Village government, and Community welfare.

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dalam peran dan upaya pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga desa dalam pembangunan dan perekonomian untuk kesejahteraan desa. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. (Sadid. H, 2013).

Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap individu dan kesejahteraan diciptakan agar setiap individu mampu untuk mengembangkan kualitas hidup, hal ini perlu didukung oleh peran lembaga negara khususnya pada pemerintah desa. Karena pertumbuhan kualitas hidup di sebagian besar daerah di Indonesia tidak merata bahkan belum merasakan dampak dari kebijakan pemerintah sebagai negara demokrasi mendapatkan hal yang adil dan merata. Wewenang otonomi daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa salah satu bentuk usaha yang bertujuan disektor pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing desa. Dengan adanya otonomi daerah dapat memaksimalkan lembaga pemerintah desa agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari otonomi daerah melalui pelayanan publik dan perkembangan perekonomian desa yang dapat bersaing sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera.

Selain pada bidang perekonomian, pembangunan infrastruktur desa merupakan tugas dan peran pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Secara umum pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu

pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani atau masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran, serta pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu adalah salah satunya disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang kurang melibatkan masyarakat, dan persiapan yang kurang. (Oroh, 2015).

Perkembangan zaman membawa dampak pesat bagi kehidupan masyarakat desa Kedungwangi baik dalam sistem mata pencaharian, pembangunan, perekonomian maupun sistem pemerintahan desa. Seperti pada saat musim panen dan akan tanam padi pemerintah desa mengadakan penyuluhan kepada petani desa dengan mengenalkan obat ataupun alat pertanian yang dapat membantu pekerjaan petani. dan tidak hanya pada bidang pertanian saja pemerintah desa juga sering mengadakan penyuluhan di berbagai bidang seperti keamanan, perekonomian dan sebagainya. Pemerintah desa Kedungwangi mengupayakan berbagai cara dan kebijakan dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi desa yang ada sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di desa Kedungwangi dengan pertimbangan setelah dilakukan studi observasi pendahuluan pada tanggal 19 September 2021, peneliti menemukan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa Kedungwangi menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan desa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data yang terkumpul dalam kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam, karena menggambarkan hubungan suatu gejala yang satu dengan gejala yang lain. Penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Peneliti mengumpulkan sumber data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti menggunakan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Data yang telah dikumpulkan dari informan dan lokasi penelitian agar memperoleh keabsahan, maka data temuan tersebut diteliti dengan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN

1. Peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pembangunan infrastruktur desa.

a. Peran Pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Pemerintah desa mempunyai peranan yang berpengaruh terhadap masyarakat di pedesaan, salah satu peranan pemerintah desa dapat dilihat dari pembangunan desa. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur. Tujuan utama pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa Kedungwangi dalam pembangunan infrastruktur desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pembangunan desa sangat diutamakan karena pembangunan desa dibutuhkan dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat desa Kedungwangi, selain itu hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan antara lain balai desa, jalan desa, lumbung pangan, bak tangka air, polkesdes, TPS/TPA dan pos kamling. Pembangunan tersebut akan terus berjalan apabila dana pembangunan desa

yang dilaporkan dapat terealisasi dan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa Kedungwangi.

b. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam hasil wawancara oleh peneliti dengan narasumber mengenai perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat adalah dengan menyusun atau merancang dan mengumpulkan usulan dari masyarakat kemudian diadakan musyawarah dusun, setelah melakukan musyawarah dusun dilakukan musyawarah desa dan terakhir dibuat laporan perencanaan pembangunan seperti kegiatan pembiayaan dan dana yang dibutuhkan pada saat pembangunan RPJM dan RKP. Pada saat perencanaan pemerintah desa Kedungwangi mengambil keputusan dengan diadakan musyawarah dengan masyarakat desa hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar karena merupakan kepentingan bersama dan harus disepakati dan disetujui bersama.

c. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan pembangunan di desa Kedungwangi tahapan pelaksanaan pembangunan desa Kedungwangi dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa dan tahap pelaksanaan di desa itu dilakukan dengan gotong-royong dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk membangun infrastruktur desa. Pelaksanaan pembangunan di desa Kedungwangi dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi 7 tahapan yaitu penetapan pelaksanaan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja dan bahan/material untuk pembangunan.

d. Pengawasan Pembangunan Desa

Dari hasil wawancara mengenai pengawasan pembangunan desa kegiatan tersebut sudah diamanatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tercipta sebuah pemberdayaan masyarakat yang baik. Pemantauan dan pengawasan ini dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penilaian yang dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan di desa

Kedungwangi adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa yang dilakukan pada saat rapat musyawarah yang diadakan setahun sekali.

2. Faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pembangunan infrastruktur desa.

a. Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur Desa

Dalam penelitian peran pemerintah desa Kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat terdapat faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur desa faktor tersebut adalah rasa ingin maju oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, perkembangan teknologi dan zaman yang menjadi faktor pendukung pembangunan, potensi desa yang sangat besar baik dari segi wilayah maupun SDM dan yang terpenting pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat desa.

b. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Desa

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Kedungwangi terdapat faktor penghambat peran pemerintah desa Kedungwangi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat faktor tersebut diantaranya adalah pada pendanaan, SDM, keadaan ekonomi desa dan hambatan fisik atau wilayah desa yang perlu banyak dilakukan kegiatan pembangunan.

3. Peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Perekonomian desa.

a. Peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang perekonomian desa di sektor perdagangan dan pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan

Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya pada bidang pembangunan, namun juga pada bidang perekonomian desa. dalam wawancara dengan bapak Musyafa' selaku kepala desa Kedungwangi peran pemerintah desa dalam bidang perekonomian juga sejalan dengan pembangunan, karena kedua hal tersebut beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam

sektor perekonomian adalah melakukan penyuluhan pada masyarakat desa pada bidang ekonomi seperti penyuplaian barang dagangan dan pertanian.

b. Sektor pertanian

Dari hasil wawancara dengan bapak Suwito selaku ketua RT desa Kedungwangi dan juga seorang petani mengenai peran pemerintah desa Kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat melalui sektor pertanian pemerintah desa melakukan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat desa khususnya kepada petani karena mayoritas masyarakat desa Kedungwangi adalah sebagai petani, sehingga pemerintah desa Kedungwangi mengadakan penyuluhan dan pembinaan dengan mendatangkan mesin untuk membantu pekerjaan petani seperti mesin pemotong padi, mesin pembajak sawah, diesel pengairan sawah dan memberikan pengetahuan tentang obat pertanian seperti pembasmi hama, penyubur tanaman dan lain lain yang dapat membantu petani.

Sementara untuk hasil yang telah diberikan oleh pemerintah desa Kedungwangi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian adalah dengan memberikan penyuluhan pada alat-alat pertanian seperti mesin pembajak sawah, mesin panen padi, dan mesin tanam jagung. Dengan adanya peran pemerintah yang berkerjasama dengan pertanian membuat perekonomian masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani kini semakin maju dan hasil pertanian semakin meningkat.

c. Sektor perdagangan

Dari hasil wawancara dengan bapak Nari selaku warga masyarakat dan juga bermata pencaharian sebagai seorang pedagang bahwa peran yang dilakukan pemerintah desa Kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat dari sektor perdagangan adalah dengan memberikan penyuluhan terhadap pensuplaian barang dagangan dan lebih mudahnya akses untuk pensuplaian barang karena jalur transportasi atau akses jalan desa yang bagus serta pembangunan pasar tradisional yang merupakan titik perekonomian bagi masyarakat desa. Sementara hasil dari peran pemerintah desa dalam bidang perekonomian di sektor perdagangan adalah pembangunan pasar tradisional untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa hal ini dilakukan agar

transaksi atau proses jual beli dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tercapai dan mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.

4. Faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Perekonomian desa.

a. Faktor Pendukung Perekonomian Desa

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala desa Kedungwangi bapak Musyafa' mengenai faktor pendukung yang dialami pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah rasa yang timbul dari masyarakat yang ingin maju dengan perekonomian yang baik, perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih yang menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dalam bidang perekonomian desa.

b. Faktor Penghambat Perekonomian Desa

Dari hasil wawancara bapak Suwito selaku ketua RT dan bapak Nari selaku masyarakat bahwa faktor penghambat perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disektor pertanian adalah dari pendidikan dan warga masyarakat yang lebih nyaman dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, minimnya pemahaman tentang sistem dan alat pertanian saat ini, sementara pada sektor perdagangan faktor penghambatnya adalah harga dagangan yang tidak menentu kadang naik dan kadang turun yang menyebabkan keuntungan tidak menentu dalam berdagang.

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pembangunan infrastruktur desa.

a. Peran Pemerintah desa dalam Pembangunan Infrastuktur Desa

(Dahlan, 1999:5 dalam Akib. K. 2017) Peranan berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau, pemain atau bertindak. Sedangkan peranan mempunyai arti fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh

suatu Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *Nation Building*.

Pembangunan menjadi pekerjaan yang masih terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah-daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah desa berperan penting dalam sebuah pembangunan desa, hal ini dilandasi oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang didalamnya terdapat pasal yang membahas tentang pembangunan desa yaitu pada pasal 78.

Dalam hal ini peran pemerintah desa Kedungwangi dalam pembangunan infrastruktur desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Pembangunan desa sangat diutamakan karena pembangunan desa dibutuhkan dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat desa Kedungwangi, selain itu hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan antara lain balai desa, jalan desa, lumbung pangan, bak tangka air, polkesdes, TPS/TPA dan pos kamling. Pembangunan tersebut akan terus berjalan apabila dana pembangunan desa yang dilaporkan dapat terealisasikan dan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat desa Kedungwangi.

b. Perencanaan Pembangunan Desa

Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Berbicara mengenai masalah pembangunan desa kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan diambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah

pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan. (Hadisaputra. M. 2018).

Dalam kegiatan perencanaan pembangunan pendamping atau pemerintah desa harus menjalankan tugasnya dengan baik, dengan cara memahami dinamika masyarakat dan pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. Dengan demikian dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik sesuai porsi yang sudah ditentukan. Pemerintah desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. (Hadisaputra. M. 2018).

c. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, Kepala Desa mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan Desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa. Menurut buku panduan perencanaan pembangunan desa ada dua pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah pembangunan desa yang berskala lokal desa dan juga ada pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pembangunan desa berskala lokal desa ini dilaksanakan sejak ditetapkannya APBDesa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan desa berskala lokal melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya. Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa seperti camat dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. (Sarah, 2021).

d. Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan dalam pasal 78 pembangunan desa terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa yang dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat desa yang

bertujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan masyarakat adalah setiap pengaduan, kritik, saran yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Nawawi, 2003 dalam Sarah, 2021).

Kegiatan tersebut sudah diamanatkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tercipta sebuah pemberdayaan masyarakat yang baik. Kegiatan sangat menentukan kegiatan pembangunan desa karena pemantauan dan pengawasan merupakan dasar dalam pembahasan musyawarah desa. pemantauan dan pengawasan ini dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Penilaian yang dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan di desa Kedungwangi adalah dengan menilai RPJM Desa dan RKP Desa yang dilakukan pada saat rapat musyawarah yang diadakan setahun sekali.

2. Faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pembangunan infrastruktur desa.

a. Faktor Pendukung Pembangunan Infrastruktur Desa

Faktor pendorong merupakan hal-hal yang mendukung keberhasilan suatu kegiatan (Lestari, 2018). Dalam penelitian peran pemerintah desa Kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat terdapat faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur desa faktor tersebut adalah rasa ingin maju oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, perkembangan teknologi dan zaman yang menjadi faktor pendukung pembangunan, potensi desa yang sangat besar baik dari segi wilayah maupun SDM dan yang terpenting pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat desa.

b. Faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur Desa

Jika merujuk pada KBBI, faktor penghambat berarti keadaan atau penyebab yang menghalangi pencapaian suatu hal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Kedungwangi terdapat faktor penghambat peran

pemerintah desa Kedungwangi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat faktor tersebut diantaranya adalah pada pendanaan, SDM, keadaan ekonomi desa dan hambatan fisik atau wilayah desa yang perlu banyak dilakukan kegiatan pembangunan.

3. Peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Perekonomian desa.

- a. Peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang perekonomian desa di sektor perdagangan dan pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan

Menurut Suhardjo dalam Ruru 2020 pengertian ekonomi desa adalah berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Semakin berkembangnya sektor perekonomian, lapangan pekerjaan di sebuah desa menjadi lebih bervariasi tidak hanya mengunggulkan pada sektor pertanian saja namun juga dapat mengunggulkan di sektor ekonomi industry dengan memberdayakan masyarakat.

Menurut Sulistiyani (2004) bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kekuatan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam sektor perekonomian adalah melakukan

penyuluhan pada masyarakat desa pada bidang ekonomi seperti penyuplaian barang dagangan dan pertanian.

b. Sektor pertanian

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara berkembang seperti Indonesia. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini disebabkan beberapa faktor Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Kedua, meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian dapat menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk sektor lain terutama sektor industri. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Kelima, sektor pertanian merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan (Pratomo, 2010).

c. Sektor perdagangan

Perdagangan merupakan suatu usaha yang bermanfaat untuk di distribusikan dari produsen ke konsumen. Perdagangan merupakan sektor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi disetiap daerah tertentu. Perdagangan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Adanya kemajuan pada sektor ekonomi dalam suatu wilayah menggambarkan adanya pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, serta memberikan sumbangan dalam penciptaan lapangan usaha, memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkaitan dan menunjang dengan sektor lainnya. Pembangunan perdagangan berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas perekonomian suatu daerah yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. (Wahyuni. S. 2019).

4. Faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Desa Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Perekonomian desa.

a. Faktor Pendukung Perekonomian Desa

Faktor pendukung Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, dan mempercepat suatu upaya atau tindakan. Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala desa Kedungwangi bapak Musyafa' mengenai faktor pendukung yang dialami pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah rasa yang timbul dari masyarakat yang ingin maju dengan perekonomian yang baik, perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih yang menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dalam bidang perekonomian desa.

b. Faktor Penghambat Perekonomian Desa

Faktor penghambat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya hambatan terhadap sesuatu. Dari hasil wawancara bapak Suwito selaku ketua RT dan bapak Nari selaku masyarakat bahwa faktor penghambat perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disektor pertanian adalah dari pendidikan dan warga masyarakat yang lebih nyaman dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, minimnya pemahaman tentang sistem dan alat pertanian saat ini, sementara pada sektor perdagangan faktor penghambatnya adalah harga dagangan yang tidak menentu kadang naik dan kadang turun yang menyebabkan keuntungan tidak menentu dalam berdagang.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Peran pemerintah desa Kedungwangi dalam menyejahterakan masyarakat di bidang pembangunan sangat diutamakan karena pembangunan desa sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat desa Kedungwangi, pembangunan di desa dilandasi oleh UU Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang desa dan pada pasal 78 membahas tentang pembangunan desa yang meliputi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan antara lain balai desa, jalan desa, lumbung pangan, bak tangki air, polkesdes,

TPS/TPA dan pos kamling. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menyajahterakan kehidupan masyarakat desa Kedungwangi.

2. Faktor pendukung peran pemerintah desa Kedungwangi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pembangunan infrastruktur desa adalah rasa ingin maju, perkembangan teknologi dan zaman, pembangunan, potensi desa yang sangat besar baik dari segi wilayah maupun SDM dan yang terpenting pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat desa. Sementara untuk faktor penghambatnya adalah pada pendanaan, SDM, keadaan ekonomi desa dan hambatan fisik atau wilayah desa yang perlu banyak dilakukan kegiatan pembangunan
3. Peran pemerintah desa dalam bidang perekonomian juga sejalan dengan pembangunan, karena kedua hal tersebut beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam sektor perekonomian adalah melakukan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat desa pada bidang ekonomi seperti penyuplaian barang dagangan dan mendatangkan mesin untuk membantu pekerjaan petani seperti mesin pemotong padi, mesin pembajak sawah, diesel pengairan sawah dan memberikan pengetahuan tentang obat pertanian seperti pembasmi hama, penyubur tanaman dan lain lain yang dapat membantu petani dan masyarakat.
4. Faktor pendukung peran pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalah rasa yang timbul dari masyarakat yang ingin maju dengan perekonomian yang baik, perkembangan teknologi dan zaman yang semakin canggih yang menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk maju dalam bidang perekonomian desa. Untuk faktor penghambat perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disektor pertanian adalah dari pendidikan dan warga masyarakat yang lebih nyaman dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, minimnya pemahaman tentang sistem dan alat saat ini, sementara pada sektor perdagangan faktor penghambatnya adalah kurang stabilnya harga menyebabkan keuntungan tidak menentu dalam berdagang.

SARAN

1. Bagi pemerintah desa.

Untuk pemerintah desa diharapkan meningkatkan pembangunan dan perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa karena pada saat ini pembangunan dan perekonomian sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan selalu melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar potensi desa dalam bidang pertanian dan perekonomian semakin maju.

2. Bagi masyarakat.

Untuk masyarakat diharapkan mampu meningkatkan sumber daya di bidang pertanian dan perdagangan yang dimiliki untuk dikembangkan agar dapat terciptanya masyarakat desa yang sejahtera.

3. Bagi program studi PPKn.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi pada mata kuliah Otonomi Daerah dan *Good Goernance*, Hukum Tata Pemerintahan, dan Politik Hukum.

4. Bagi peneliti lanjutan.

Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian lanjutan dan dapat mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Haris. S. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.

Solekhan. M. 2014. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surjadi. 1989. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Mandar Maju.

Surya. W. 1999. Otonomi Daerah di Era Reformasi. Jakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1945 tentang pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 1 Angka 8, mengenai pengertian Dana Desa.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Almasari dan deswimar. 2014. Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/657> . (online) diakses tanggal 22 Maret 2022.

Aflaha. R. 2015. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/1544/2/>. (online) diakses tanggal 3 Februari 2022.

Akib K. 2017. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa malitu kecamatan poso pesisir selatan kabupaten poso. <https://media.neliti.com/media/publications/317749-peranan-pemerintah-desa-dalam-pembanguna-90d9e94e.pdf> (Online) diakses tanggal 1 juni 2022.

Ambarwati. E. 2016. <http://eprints.umpo.ac.id/2656/2/BAB%20I.pdf> . (online) diakses tanggal 3 Oktober 2021.

AM. Ruru dkk, 2020. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa ranolambot kecamatan kawangkoan barat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/30545/29411>. (online) diakses tanggal 22 Maret 2022.

Azmi, 2021. Meningkatkan ekonomi masyarakat. <http://repository.radenfatah.ac.id/15606/2/BAB%20II.pdf> (online) diakses tanggal 24 maret 2022.

Darmansyah. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao Di Desa Kayuangan Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. <https://journal.unismuh.ac.id/> . (online) diakses tanggal 3 Oktober 2021.

Ferizaldi. 2016. Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia. Sulawesi. UNIMAL PRESS. <https://repository.unimal.ac.id> . (online) diakses tanggal 19 Januari 2022.

Gunandi M. 2021. Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. <https://retizen.republika.co.id/> . (online) diakses tanggal 4 Oktober 2021.

Hadisaputra M. 2018. Perencanaan Pembangunan Desa. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/perencanaan-pembangunan-desa-a-mukhtar-hadisaputra/> (Online) diakses 28 mei 2022.

Oroh. S. 2014. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat

- Kabupaten Minahasa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/> . (online) diakses tanggal 3 Oktober 2021.
- Putra DP. 2017. Tinjauan Kesejahteraan Sosial. <http://repository.unpas.ac.id/31050/3/BAB%20II.pdf> (online) diakses 16 Januari 2022.
- Reynold Simandjuntak . 2016. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. <https://media.neliti.com/> .(online) diakses tanggal 19 Oktober 2021.
- Ruru. AM. 2020. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa ranolambot kecamatan kawangkoan barat. <https://ejournal.unsrat.ac.id/> (Online) diakses tanggal 1 juni 2022.
- Simandjuntak, Reynold. 2016. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. <http://repo.unima.ac.id/> (online) diakses tanggal 3 oktober 2021.
- Sugiman. 2018. Pemerintah desa. <https://media.neliti.com/media/publications/> .(online) diakses tanggal 19 Oktober 2021.
- Syifa. A. 2021. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pembangunan Wisata Edukasi Pertanian Di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Garut. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/mimbaragribisnis/article/download/4898/pdf> . (Online) diakses 28 mei 2022.
- Wahyuni. S. 2019. Analisis pengaruh sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor jasa terhadap produk domestik regional bruto (pdrb) dalam perspektif ekonomi islam. <http://repository.radenintan.ac.id/> . (Online) diakses tanggal 27 mei 2022.
- Wulandary. R. 2018. Peranan Pemerintah Kota Batu Dan Pemerintah Desa Puntan Dalam Pemberdayaan Wisata Petik Apel. <https://jurnal.unitri.ac.id/> . (online) diakses tanggal 6 Februari 2022.